

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Judul skripsi ini adalah *Perbandingan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Nuklir Iran Dan Nuklir Pakistan*. Beberapa alasan penulis memilih judul tersebut, yaitu :

1. Iran dan Pakistan adalah merupakan negeri yang cukup diperhitungkan di kawasan masing-masing, yaitu Kawasan Timur Tengah dan Kawasan Asia Selatan.
2. Iran dan Pakistan mempunyai persamaan secara ideologi negara yaitu Islam, keduanya merupakan negara Islam yang maju dalam pengembangan program nuklir.
3. Walaupun secara ideologi Iran dan Pakistan sama, yaitu Islam, akan tetapi sikap politik luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran dan Pakistan berbeda. Dengan demikian ada ambivalensi ataupun standar ganda yang diterapkan Amerika Serikat.
4. Jika kekawatiran Amerika Serikat akan program nuklir suatu negara, karena negara tersebut punya potensi konflik dengan negara lain. Padahal, Iran saat ini potensi konflik ataupun perang terbuka dengan negara lain lebih kecil, jika dibandingkan dengan Pakistan yang mempunyai potensi konflik ataupun perang terbuka lebih besar, yaitu dengan India dalam masalah Kashmir.

ikut menandatangani, akhirnya menarik diri dari NPT dan menyatakan kini memiliki senjata nuklir³.

Namun demikian hanya segelintir negara saja yang mendapat tantangan atas program nuklirnya. Tantangan tersebut terutama datang dari negara-negara adikuasa. Program nuklir yang dijalankan oleh Iran dan Korea Utara selalu ditentang keras oleh Amerika Serikat. Padahal disisi lain banyak negara-negara yang menjalankan program nuklir serta memiliki persenjataan seperti Rusia, Korea Selatan, Jepang, Cina dan lain-lain, termasuk juga Amerika Serikat sendiri. Ditambah lagi dengan kasus lain, Israel termasuk negara yang memiliki senjata nuklir, tetapi tidak ditentang oleh Amerika Serikat. Padahal menurut Harold Mueller, direktur eksekutif dan kepala riset pelucutan senjata di *Peace Research Institute of Frankfurt*, Israel merupakan negara pemilik senjata nuklir yang menolak menandatangani NPT seperti halnya Pakistan dan India.

Sikap Amerika Serikat terhadap masalah nuklir belakangan ini sangat nampak tidak konsisten ketika Amerika Serikat begitu menekan Iran untuk menghentikan program nuklirnya, sedangkan kepada Pakistan tidak memberikan reaksi keras terhadap program nuklir Pakistan. Padahal Pakistan telah lama dicurigai sebagai penjual teknologi senjata nuklir kepada negara-negara yang ditentang program nuklirnya oleh Amerika Serikat. Hal ini dapat diketahui setelah Abdul Qadeer Khan, "Bapak Atom Pakistan", awal Februari 2004 membuat pengakuan mengejutkan bahwa dia telah lama menjual teknologi senjata nuklir kepada Iran, Libya, dan Korea Utara.

³ *316* *Journal of Asian Studies*, Vol. 41, No. 1, Spring 2005, p. 14.

Keterlibatan Pakistan tersebut terungkap di tengah tekanan AS dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terhadap Iran agar negara itu bersedia diperiksa oleh tim IAEA untuk mengetahui apakah program nuklirnya melibatkan upaya untuk membuat senjata nuklir. Juga, pada saat dunia yang dimotori AS menekan Korut agar menyetop programnya, dan tidak sampai setahun setelah AS menginvasi Irak karena diduga mempunyai senjata pemusnah massal (nuklir). Sementara Iran, Irak, mendapat tekanan, perlakuan berbeda diterima oleh Pakistan⁴.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Mengapa sikap politik luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir di Iran dan Pakistan berbeda, padahal sama-sama mempunyai program nuklir ?

D. Kerangka Pemikiran

Dengan melihat latar belakang masalah dan perumusan masalah tersesebut diatas, maka dapat diuraikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Teori Persepsi

Setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara adalah merupakan hasil keputusan dari *decision-makers* yang diambil dari pilihan yang ada, serta memiliki otoritas yang bertindak atas nama negara, seperti pendapat Richard C Sayder :

*it is one of our methodological choices to define the state as its official decision-makers, those whose authoritative acts are to all intents and purpose, the acts of the state. State action is the action taken by those acting in the name of the state*⁵

Selanjutnya Snyder berpendapat bahwa dalam mendefinisikan suatu situasi obyektif yang dibutuhkan keputusan sebagai antisipasi terhadap keputusan tersebut, *decision-makers* sering terjebak pada situasi yang subyektif⁶. *Decision-makers* memandang situasi yang obyektif melalui sudut pandang yang tertanam dibenak mereka, sehingga tidak menggambarkan kondisi obyektif yang sebenarnya.

Menurut Judith Miller, secara eksplisit menyatakan bahwa bubarnya Uni Soviet dan partai Komunisnya yang selama ini dipandang sebagai ancaman bagi Amerika Serikat, telah mengubah kebijaksanaan global negara adidaya itu. Kini, Amerika Serikat mencemaskan kebangkitan kaum militan Islam diberbagai negara di Timur Tengah⁷.

Pemunculan militansi Islam telah menimbulkan perdebatan seru tentang apa yang harus dilakukan untuk membendung kecenderungan itu. Sementara itu para pejabat dan komentator politik Amerika Serikat dengan gamblang menyatakan bahwa pemunculan militansi Islam itu merupakan ancaman baru bagi dunia Barat. Oleh karena itu harus dibendung, sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Komunisme. Menurut mereka sangat salah kalau membiarkan golongan yang dengan jelas-jelas

⁵ James E Dogherly and Robert L Pflztzgraff Jr, *Contending Theories of International Relations*, JB Lippincot Company, hal 315

⁶ *Ibid.*, hal. 316

⁷ ...

anti demokrasi dan terutama anti Israel menguasai kawasan yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup dan keamanan Amerika Serikat

Pandangan Amerika Serikat terhadap Iran, bahwasanya Iran adalah sebagai negara Islam fundamental yang eksklusif, tempat kaum militansi Islam yang membahayakan bagi kawasan sreategis kepentingan Amerika Serikat, yaitu Timur-Tengah termasuk didalamnya Israel. Namun, pandangan tersebut tidak berlaku terhadap Pakistan, yang dianggap sebagai negara yang demokratis di kawasan Asia Selatan, yang tidak se-strategis kawasan Timur-Tengah.

Menurut Kenneth Boulding, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita didunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata mungkin berbeda.

Kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijakan dan tindakan-tindakan...tidak melakukan tindakan terhadap fakta-fakta situasi yang "obyektif"...tetapi "citra" mereka tentang situasi itu. Yang menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia⁸.

Orang melakukan tindakan berdasarkan yang mereka ketahui. Tanggapan orang terhadap suatu situasi tergantung bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang "kenyataan". Menurut teori persepsi yang dikemukakan oleh Ole R Holsti, diasumsikan bahwa :

Persepsi selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan dan lain-lain juga mengandung

⁸ Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU-UGM, 1989 hal 19-20

digdaya yang hanya ingin mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Ia ingin terus memelihara superioritasnya dengan cara memandulkan setiap potensi yang hendak menyaingi kekuatannya. Dunia memang tidak adil. Dan karena merasa diperlakukan tidak adil inilah, Iran akhirnya berteriak mengancam akan keluar dari NPT, menyusul Korea Utara. Benar-benar kontraproduktif, karena Iran bisa semakin mendekati diri dengan Korut, geng "Poros Setan" yang terus mengancam dunia dengan membangun senjata nuklir¹¹.

2. Konsep Politik Luar Negeri

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, suatu negara mempunyai politik luar negeri dimana semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara berhubungan dengan negara lain¹². Output kebijakan luar negeri biasanya merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungan yaitu kebijakan, sikap atau tindakan negara.

Politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Cecil V Crabb Jr. menyatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan (kepentingan nasional) dan sarana (kemampuan) dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri ada dua elemen yaitu tujuan nasional (*national*

¹¹ *Pikiran Rakyat* 18 November 2004

¹² James R. Payne, *Co-Operative Diplomacy and Foreign Policy*, New York, 1966

objective) yang hendak dicapai dan juga sarana (*means*) untuk mencapainya¹³.

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton politik luar negeri :

“Strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh pembuat keputusan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Dan politik luar negeri merupakan proses yang dinamis dalam menentukan interpretasi yang relatif mantap terhadap kepentingan-kepentingan nasionalnya dalam menghadapi faktor-faktor situasional yang sering berubah di lingkungan internasional. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang diikuti oleh usaha-usaha untuk mencapai pelaksanaan garis-garis kebijakan luar negeri secara diplomatis”¹⁴.

Dalam definisi yang dikemukakan oleh Plano dan Olton tersebut terdapat ada empat unsur utama dalam politik luar negeri. Keempat unsur tersebut adalah strategi, aktor-aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara. Jadi politik luar negeri bertujuan untuk mewujudkan, cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Dengan kata lain politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Berkenaan dengan konsep tujuan, KJ Holsti menyebutkan sebagai suatu gambaran peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang akan diwujudkan pemerintah melalui pembuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan

¹³ Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations Power and Justice*, New Jersey Prentice-Hall Inc, 1978. hal 87

¹⁴ F. A. S. ...

mengubah atau mendukung sikap negara lain berdasarkan nilai yang diletakkan pada tujuan, unsur waktu dan jenis tuntutan terhadap negara lain dalam sistem tujuan politik luar negeri dapat dibedakan menjadi : *pertama*, nilai dari kepentingan inti yang melibatkan setiap eksistensi pemerintahan dan bangsa yang harus dilindungi dan diperluas sepanjang waktu. Ini merupakan jenis kepentingan yang setiap orang mau melakukan pengorbanan sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis Tujuan jenis ini seringkali dihubungkan dengan pemeliharaan diri dari unit politik. Ini merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan ini tidak akan mungkin tercapai jika unit politik tidak dapat mempertahankan keberadaannya.. Tujuan jangka pendek negara biasanya berupa usaha untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan wilayah nasional dan mengekalkan sistem politik, sosial dan ekonomi berdasarkan wilayah tersebut jenis lainnya kesatuan etnis, bahasa dan agama¹⁵.

Kedua, tujuan jangka menengah. Jenis ini dapat berupa usaha pemerintah dalam menenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Untuk itu komitmen utama pemerintah modern biasanya mengejar rangking tindakan yang mempunyai dapat tinggi terhadap kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan serta harapan dalam negeri. Tujuan jangka menengah yang lain adalah meningkatkan prestise

¹⁵ K. J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, New York, Random House

negara dalam sistem internasional. Disini prestise diukur dengan tingkat perkembangan industri, ketrampilan ilmiah dan teknologi. Selain itu tujuan jangka menengah dapat berupa bentuk perluasaan diri atau imperialisme¹⁶.

Ketiga, tujuan jangka panjang atau universal. Jenis ini merupakan rencana atau impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional menyeluruh menurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan¹⁷.

Elemen kedua dari politik luar negeri adalah sarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Terdapat beberapa teknik dalam perilaku politik luar negeri yaitu yang bersifat verbal (misalnya berupa diplomasi atau propaganda) dan yang berupa action (yaitu aktivitas ekonomi dan militer)¹⁸.

Dalam hubungan antar negara terdapat peran nasional yang dijalankan oleh masing-masing negara. Peran nasional merupakan output kebijakan luar negeri yang hanya dikaitkan dengan negara yang terlibat dalam masalah sistem dan regional. Terdapat dua peran nasional yang umum yaitu sebagai pembela regional (peran melindungi negara lain dalam suatu wilayah tertentu) dan sebagai mediator (peran dalam menyelesaikan konflik internasional). Selain peran nasional dan tujuan, kebijakan luar negeri juga mengandung komponen tindakan, yaitu hal

¹⁶ *Loc cit.*

¹⁷ *Loc cit.*

¹⁸ F. English, *Behavior of International Organizations*, Little, Brown, Boston, 1968, p. 100.

yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap pihak lain guna memenuhi peran nasionalnya atau mencapai dan mempertahankan tujuannya¹⁹. Tindakan merupakan suatu bentuk komunikasi yang dimaksimalkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan.

3. Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Setelah runtuhnya negara Uni Soviet yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, yang dapat juga dimaknai runtuhnya komunisme. Era ini disebut juga dengan era paska perang dingin. Dalam era ini politik luar negeri Amerika Serikat juga mengalami perubahan penting. Era paska perang dingin menjadikan publik Amerika Serikat berkurang minatnya terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam percaturan internasional serta globalisasi dan ketergantungan antar-negara menghadirkan kepentingan domestik dalam menghadirkan keputusan politik luar negeri²⁰

Negara besar seperti Amerika Serikat mempunyai peran nasional sebagai mediator pemersatu²¹. Ini berarti Amerika Serikat harus mampu bertanggung jawab untuk memenuhi tugas mediasi khusus untuk mendamaikan negara lain atau kelompok negara. Atau dengan kata lain, Amerika Serikat merupakan pemersatu regional dan global.

¹⁹ Holsti, *op cit* hal 158.

²⁰ Bambang Cipto, *Tekanan Amerika Terhadap Indonesia : Kajian Atas Kebijakan Luar Negeri Clinton Terhadap Indonesia*, Pusaka Belajar, Yogyakarta, 2002, hal. 10.

Kemampuan Amerika Serikat untuk berperan besar dalam politik internasional tidak terlepas dari kenyataan bahwa Amerika Serikat mempunyai semua sumberdaya yang membuat kekuasaannya menjadi mantap. Amerika Serikat mempunyai kekuasaan dalam bidang militer, ekonomi, ilmu pengetahuan yang dilengkapi dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar.

Politik luar negeri Amerika Serikat mencakup keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah nasional Amerika Serikat tentang tindakan terhadap negara lain atau kelompok negara di dunia. Masing-masing presiden mempunyai tekanan yang berbeda terhadap pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat. Namun demikian, tujuan-tujuan dasar dari politik luar negeri Amerika Serikat adalah konstan dari waktu ke waktu.

Politik luar negeri Amerika Serikat secara umum dilaksanakan untuk mencapai tujuan dasar sebagai berikut:²²

- a. *National Security* (keamanan nasional)
- b. *World Peace* (perdamaian dunia)
- c. *Self Government* (pemerintahan sendiri)
- d. *Free and Open Trade* (perdagangan bebas dan terbuka)
- e. *Concern for Humanity* (kepedulian terhadap kemanusiaan)

Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, presiden memegang peranan besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Presiden

²² Richard C Remy, Lary Elowitz and William Berlin, *Government In The United States*, New York, Mac Millan Publishing Company, 1984. hal. 310.

Merupakan pembuat keputusan utama²³. Meski kongres mempunyai peran penting dalam menentukan politik luar negeri, namun tanggung jawab utama ada di tangan presiden. Meskipun demikian, keputusan yang diambil seringkali di pengaruhi oleh pendapat umum (*publik opinion*) dan organisasi penekan dalam masyarakat Amerika Serikat. Banyaknya publik luar yang ikut dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah merugikan untuk pembuatan kebijakan yang efisien

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era pasca perang dingin mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut : *pertama*, Amerika Serikat harus terlibat dan memimpin dunia. *Kedua*, Amerika Serikat harus terus mempertahankan dan memperkuat hubungan kerjasama dengan negara-negara terkuat dunia. *Ketiga*, penting bagi Amerika Serikat untuk membangun institusi-institusi yang mempromosikan kerjasama ekonomi dan keamanan. *Keempat*, Amerika Serikat mendukung demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM), sebab hal ini sejalan dengan ide-ide Amerika Serikat dan merupakan kepentingan bagi Amerika Serikat²⁴.

4. Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional diartikan sebagai kelangsungan hidup (*survival*) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik. Mempertahankan rezim ekonomi, politik dan memelihara identitas kultural. Hans J. Margenthou menyatakan bahwa esensi politik luar negeri

negara didasarkan pada kepentingan domestik, atau politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional²⁵.

Menurut Holsti untuk menjelaskan kepentingan nasional di negara-negara dewasa ini terdapat empat elemen kepentingan nasional, yaitu : keamanan (*security*), otonomi (*autonomy*), kesejahteraan (*welfare*) dan peningkatan status (*prestigious*)²⁶.

a. Keamanan (*security*)

Tujuan ini merupakan kebutuhan tiap-tiap negara untuk mempertahankan dirinya dalam arti melindungi penduduk, wilayah dan kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan yang tidak hanya berupa perang atau hal-hal yang bersifat fisik akan tetapi sangat luas yang meliputi penduduk, pemerintah, ideologi, ekonomi.

b. Otonomi (*autonomy*)

Otonomi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memformulasikan kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri menurut prioritas pemerintah sendiri dengan resiko apapun serta kemampuan untuk menahan pengaruh, tekanan atau penguasaan oleh negara lain²⁷. Kemampuan itu harus dimiliki oleh negara bangsa apabila ingin terhindar dari tekanan pihak lain.

²⁵ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 164

²⁶ K J. Holsti, *op cit.*, hal 84.

²⁷ *Ibid.*, hal 86.

Selanjutnya, Morgenthau mengungkapkan bahwa kepentingan nasional negara adalah mengajar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain, sekaligus mempertahankan diri atas tekanan dari negara lain.³⁰

5. Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Iran

Sikap Amerika Serikat yang terus menekan Iran ini memang dapat dimengerti, karena permasalahan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran, komunikasi keduanya sudah lama tidak terjalin. Hal ini disebabkan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Iran telah putus pada tahun 1979 ketika terjadi Revolusi Islam Iran. Amerika hanya dapat berkomunikasi melalui media sekutunya yaitu negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis maupun Jerman.³¹

Disamping itu, juga ada kepentingan lain yang sangat penting yaitu minyak. Minyak sangat diperlukan bagi kelancaran industriasi di Amerika Serikat, apabila industrinya lancar maka ekonominya terjaga sehingga kelangsungan hidup rakyatnya terjaga. Untuk itu diperlukan adanya keamanan suplai minyak dari Timur-Tengah.

Faktor eksternal negara, dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di luar negeri. Amerika Serikat pada era pasca Perang Dingin berusaha untuk tetap menunjukkan *power* sebagai negara yang tidak hanya sekedar negara super power, seperti ketika masih ada negara Uni Soviet, tetapi sudah menjadi negara

hyperpower yang menjadi semakin dominan sebagai polisi dunia. Amerika Serikat melakukan unjuk kekuatan dengan mengerahkan ataupun memberikan peran terhadap sekutunya yaitu Uni Eropa serta IAEA, NPT dan juga Dewan Keamanan PBB untuk melakukan suatu tekanan terhadap Iran. Disatu sisi Amerika Serikat tidak mau sekutunya di Timur Tengah yaitu Israel mendapatkan ancaman keamanan ataupun tersaingi kekuatan militernya. Sehingga dalam kaitannya dengan persoalan nuklir Iran, Amerika Serikat masih mencampuri urusan negara lain. Dalam sidang Dewan Gubernur IAEA pada tanggal 13 September 2004, Amerika Serikat bernafsu untuk terus menekan IAEA agar salah satu putusan sidang IAEA tersebut adalah membawa masalah nuklir Iran ke Dewan Keamanan (DK) PBB.

Amerika Serikat telah berulang kali dalam berbagai kesempatan menuduh Iran telah menggunakan program nuklir sipil sebagai "topeng" bagi pengembangan program senjata nuklirnya. Sebagaimana diungkapkan Menlu Colin Powell 1 September 2004 selepas menghadiri pelantikan Presiden Panama, Amerika Serikat tengah mempelajari dan menjajaki beragam kemungkinan untuk mendapatkan sanksi DK PBB atas program nuklir Iran, baik sanksi yang bersifat politik, ekonomi, dan diplomatik maupun bentuk sanksi lainnya. Powell sendiri kini telah menugaskan para diplomat Amerika Serikat untuk melobi anggota IAEA untuk tujuan dimaksud yaitu membawa program nuklir Iran ke sidang DK PBB³²

Menurut Judith Miller, secara eksplisit menyatakan bahwa bubarnya Uni Soviet dan partai Komunisnya yang selama ini dipandang sebagai ancaman bagi Amerika Serikat, telah mengubah kebijaksanaan global negara adidaya itu. Kini, Amerika Serikat mencemaskan kebangkitan kaum militan Islam diberbagai negara di Timur Tengah³³.

Pemunculan militansi Islam telah menimbulkan perdebatan seru tentang apa yang harus dilakukan untuk membendung kecenderungan itu. Sementara itu para pejabat dan komentator politik Amerika Serikat dengan gamblang menyatakan bahwa pemunculan militansi Islam itu merupakan ancaman baru bagi dunia Barat. Oleh karena itu harus dibendung, sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Komunisme. Menurut mereka sangat salah kalau membiarkan golongan yang dengan jelas-jelas anti demokrasi dan terutama anti Israel menguasai kawasan yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup dan keamanan Amerika Serikat.

Pandangan Amerika Serikat terhadap Iran, bahwasanya Iran adalah sebagai negara Islam fundamental yang eksklusif, tempat kaum militansi Islam yang membahayakan bagi kawasan sreategis kepentingan Amerika Serikat, yaitu Timur-Tengah termasuk didalamnya Israel.

6. Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Pakistan

Amerika Serikat pada saat pemerintahan George W. Bush memberikan tidak sangsi yang tegas terhadap program nuklir Pakistan,

³³ Subhaddin M... 1999...
33 Subhaddin M... 1999...
33 Subhaddin M... 1999...

karena Amerika Serikat mempunyai kepentingan terhadap upaya pengejaran terorisme Islam. Setelah era pasca Perang Dingin Amerika Serikat lebih memfokuskan pada perang terhadap militansi Islam. Belajar dari pengalaman ketika era Perang Dingin, bagaimana Amerika Serikat membutuhkan Pakistan dalam rangka membendung gerak Komunisme, yaitu ketika Uni Soviet menduduki Afghanistan³⁴

Pakistan berpeluang "menekan" pemerintahan Taliban agar meluruskan pelaksanaan ajaran-ajaran agama di Afganistan yang selama ini justru menimbulkan citra Islam yang negatif di mata internasional (pelarangan wanita bersekolah/bekerja, penghancuran aset peninggalan budaya, dan lain-lain).

Disamping itu, dengan adanya potensi konflik antara India dan Pakistan dalam hal sengketa masalah Kashmir, Amerika Serikat berpotensi menjadi penengah. Sedangkan dalam kaitannya dengan bisnis persenjataan, Pakistan dapat dijadikan lahan untuk penjualan persenjataan, ketika terjadi perang terbuka antara Pakistan dengan India. Potensi konflik antara Pakistan dengan India, Amerika Serikat berusaha bersikap adil, karena India juga disinyalir mempunyai program nuklir. Program nuklir India lebih dahulu ada dibandingkan dengan Pakistan. Maka Seandainya Amerika Serikat melarang program nuklir Pakistan, maka India juga harus dilarang. Sedangkan Amerika Serikat berharap bahwa dua kekuatan besar

³⁴ Ali Ardiansa, "Pakistan: Ya dan Tidak Membantu AS", *Suara Merdeka*, 25 September 2001

di Asia Selatan tersebut tetap dalam posisi konflik, sehingga perimbangan kekuatan persenjataan kedua negara masih terus diseimbangkan.

E. Hipotesis

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan kesimpulan sementara bahwa perbedaan sikap Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran dan Pakistan adalah karena :

1. Iran dianggapnya sebagai negara Timur Tengah yang kuat, sehingga nuklir Iran dianggapnya membahayakan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.
2. Amerika Serikat mempunyai kepentingan terhadap Pakistan yang diperalatnya dalam memburu Jaringan Al Qaeda beserta Osamah Bin Leiden-nya, sehingga program nuklir di Pakistan dianggapnya tidak membahayakan bagi kepentingan Amerika Serikat.

F. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam atas perbedaan sikap politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran dan Pakistan berkaitan dengan masalah nuklir. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran Amerika Serikat dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan

G. Jangkauan Penelitian

Agar dalam penulisan terdapat ruang lingkup yang jelas, maka penulis akan memberikan batasan terhadap penelitian ini. Penulis hanya akan memfokuskan sikap politik luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir di Iran dan Pakistan kurun waktu 2002-2005. Akan tetapi penulis tidak melupakan aspek historisnya sehingga dapat diketahui causalitas permasalahan. Aspek historis yang akan penulis ulas selintas adalah berkaitan dengan putusnya hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Iran pasca Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 dan juga hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Pakistan pada saat pemerintahan Presiden Zia Ul Haq, ketika invasi Uni Soviet ke Afganistan juga pada tahun 1979.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif dengan *library research* (penelitian kepustakaan) untuk mengumpulkan data-data yang sekiranya bisa membantu dan mencari jawaban atas permasalahan diatas. Data-data yang diperoleh penulis diambil dari buku-buku literatur, kumpulan paper atau makalah para ahli, jurnal-jurnal politik, majalah, koran dan juga internet.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dalam penulisan ini dalam pembahasannya terbagi menjadi 5 (lima) bab yang bertujuan untuk membahas tentang

pemikiran penulis, secara garis besar bab-bab terdapat dalam penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai : alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, kerangka dasar teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini membahas tentang wacana kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.
- BAB III** : Bab ini akan membahas tentang wacana nuklir secara umum dan juga program nuklir Iran dan Pakistan.
- BAB IV** : Bab ini membahas mengenai perbandingan sikap politik luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran dengan nuklir Pakistan.
- BAB V** : Kesimpulan. berisi tentang kesimpulan berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya.